

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Reformasi tentang pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dimulai dengan diterbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian ketentuan tentang Pemerintah Daerah diubah kembali dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah yang berlaku sekarang adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-undang tersebut.

Penyelenggaraan Pemerintah di daerah dilaksanakan berdasarkan tiga azas (Siregar, 2017:74):

1. Desentralisasi
2. Dekonsentrasi
3. Tugas Pembantu

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi

prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan umum. Sedangkan tugas pembantu adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Anggaran digunakan oleh Pemerintah untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Kebutuhan terus berkembang. Namun sumber daya yang ada terbatas. Program dan kegiatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada *trade-off* atau kondisi yang tidak saling menginginkan dalam memilih program dan kegiatan. Karena adanya keterbatasan sumber daya, pilihan program dan kegiatan yang ada dalam anggaran diharapkan merupakan pilihan terbaik. Eksekutif diasumsikan sebagai pembuat keputusan rasional dan mampu memilih program dan kegiatan terbaik.

Mereka membuat berbagai pilihan dan prioritas untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.(Siregar, 2017)

Anggaran berbasis kinerja menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah. Sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil dan mengendalikan belanja. Program pada anggaran berbasis kinerja ini didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.

Proses anggaran atau siklus anggaran dilakukan setiap tahun anggaran (1 Tahun). Anggaran menjadi pedoman dalam melaksanakan tindakan yang akan dilakukan Pemerintah. Proses Anggaran disusun oleh Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), adalah tim yang dibentuk oleh kepala daerah dan sekretariat daerah mereka mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan Pemerintah daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. RKPD

merupakan salah satu dokumen penting suatu daerah, karena disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keuangan daerah pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara. APBD dapat memengaruhi perekonomian daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja. APBD disusun untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi pendapatan, terdapat pengaruh pajak dan retribusi daerah yang dapat menimbulkan *high cost economy* jika dilakukan secara membabi buta. Dari sisi belanja Pemerintah terhadap perekonomian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan secara akuntabilitas dan transparan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah merupakan tuntutan publik yang harus ditanggapi secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual (Mahmudi, 2016).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan (Mahmudi, 2016).

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Analisis Laporan Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghitung kemampuan dan kinerja Pemerintah Daerah diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektifitas dan Efisiensi terhadap Pendapatan Asli Daerah, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Ketergantungan Daerah. Hasil dari perhitungan tersebut lalu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat di evaluasi kemampuan dan kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kinerja Pemerintah Daerah masih rendah seperti penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Astuti. (2015),

Khairudin dan Aminah. (2017), Susilowati et al.(2016), Poyoh et al. (2017), Rahmawati dan Putra. (2016), Pandjaitan et al. (2018), Pilat dan Morasa. (2017), Kartika dan Kusuma. (2015), Saputra et al. (2016), menunjukkan hasil tingkat rasio kemandirian Pemerintah Daerah dalam tingkat instruktif atau ekstrem namun memiliki tingkat rasio efektif dan efisiensi yang cukup bagus yang artinya Pemerintah Daerah tersebut masih butuh proses dalam meningkatkan kinerjanya, Sehingga perlu adanya penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Kota Surakarta untuk mengetahui hasil kinerjanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai:

“Analisis Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013-2017.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hasil kinerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Periode Tahun Anggaran 2013 - 2017?
2. Bagaimana efisiensi dan efektivitas Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pengelolaan sumber dayanya Tahun Anggaran 2013-2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hasil Kinerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Periode Tahun Anggaran 2013-2017.

2. Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pengelolaan sumber dayanya Tahun Anggaran 2013-2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik, dapat menambahkan info dan refrensi untuk peneliti selanjutnya
2. Bagi Praktisi, dapat membantu masyarakat agar bisa menilai permasalahan daerah secara objektif.
3. Bagi Pemerintah, memberi sumbangan pikiran dalam menentukan kebijakan dan meningkatkan kinerja pemerintah.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka dibuat sistematika sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III, Metode Penelitian. Dalam Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berkaitan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV, Analisis Rasio Laporan Keuangan Daerah dan Pembahasan. Dalam bab ini menguraikan gambaran umum, hasil penelitian, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V, Penutup. Dalam hal ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran penelitian mendatang.